

Lemah, Upaya Menegakkan Demokrasi di Indonesia

Diunduh dari arielheryanto.wordpress.com

Setelah "istirahat" kurang lebih satu minggu, polemik tentang potret kekuatan-kekuatan masyarakat dalam proses demokratisasi akan dilanjutkan lagi mulai hari ini. Kali ini Prof Dr Loekman Soetrisno (guru besar dan staf peneliti pada P3PK UGM) akan memberikan tanggapannya pada tulisan Ariel Heryanto. Seterusnya akan disusul pada penanggap lain.

MENANGGAPI tulisan Dr Ariel Heryanto (JP, 29 April 1996) terlebih dahulu ada dua hal dalam kebudayaan politik bangsa Indonesia yang sangat memprihatinkan saya dan dalam kesempatan ini perlu saya ungkapkan:

Pertama, cepat goyahnya organisasi atau gerakan-gerakan yang berkeinginan mengembangkan demokrasi di negara kita.

Kedua, mudahnya dalam tubuh partai atau organisasi pro-demokrasi untuk menciptakan pengurus tandingan. Gejala pertama dapat kita lihat, yang saat ini terjadi, pada Yayasan LBHI, suatu organisasi yang tenar karena tekadnya untuk membangun demokrasi di negara kita melalui penegakan hukum. Sedangkan fenomena kedua terjadi pada PDI dan organisasi keagamaan NU.

Gejala-gejala tersebut sebagaimana memperoleh perhatian kita semua. Karena apabila kita tidak dapat mencari pemecahannya, bangsa ini akan menghadapi persoalan politik, ekonomi, dan sosial yang sangat serius.

Penjelasan yang lazim ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah bahwa hal-hal tersebut akibat campur tangan pemerintah dalam upaya melestarikan kekuasaan. Penjelasan ini mungkin benar, tetapi penjelasan itu, menurut saya, belum menjelaskan keseluruhan persoalan tersebut. Apabila bangsa ini dan pimpin parpol atau organisasi pro-demokrasi itu memang memiliki komitmen dan keyakinan yang kuat atas asas-asas sistem politik yang demokratis, sekutu apa pun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau pihak lain pasti tidak akan berhasil mengoyahkan organisasi tersebut.

KEHILANGAN PEJUANG DEMOKRASI

Pendidikan Belanda, meskipun bersifat liberal, telah menghasilkan sebuah lapisan cendekiawan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki di samping jiwa nasionalis yang tinggi juga sikap dan keyakinan terhadap demokrasi yang tinggi. Kelompok inilah yang mempersiapkan dan kemandirian mengantar bangsa ini ke alam kemerdekaan. Sangat pula menarik untuk dicatat di sini bahwa "budaya dialogis" dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia sangat pakonkret. Perdebatan-perdebatan dalam parlemen Indonesia yang dibentuk sesudah Indonesia merdeka terjadi dengan panas, tetapi tetap berjalan dalam tata cara yang demokratis. Hubungan pribadi antara mereka yang berbeda pendapat pun tak pernah terganggu. Para elite politik tampaknya mampu membedakan kehidupan politik dan kehidupan pribadi sebagai manusia.

Hal seperti itu, yakni budaya dialogis, tidak terjadi di kalangan elite politik kita, tetapi juga saya rasakan di kalangan para mahasiswa sekarang ini.

Kondisi mulai berubah ketika suatu generasi baru muncul dalam elite politik negara Indonesia. Generasi elite baru ini adalah hasil pendidikan kaum penjajah Jepang. Dalam pendidikan ini mereka diajarkan loyalitas yang mutlak pada kaisar Jepang, dengan selalu membungkukkan badan ke arah timur. Mereka juga dibiasakan berdisiplin dengan keras melalui latihan fisik militer atau penghukuman secara fisik bagi mereka yang melanggarinya.

Oleh
Loekman Soetrisno *

Sistem pendidikan ini yang serba loyal pada atasan dan penanaman disiplin secara militer, menurut saya, menghilangkan budaya dialogis yang merupakan bagian dari demokrasi. Elite politik Indonesia mulai tidak toleran pada perbedaan pendapat, mulai menciptakan budaya loyalitas total antara atasan dan bawahan, dan semakin senang menunjukkan kekuasaan melalui berbagai simbol-simbolnya. Orang Indonesia mulai mengenal apa itu disiplin yang mati. Dan, para elite politik Indonesia mulai memahami bagaimana memanfaatkan disiplin yang mati itu sebagai mekanisme mempertahankan kepentingan mereka.

Di samping kehilangan kemampuan untuk memahami dan "menikmati" perbedaan pendapat ada suatu budaya yang timbul dalam kelompok elite politik kita, yakni "budaya cengkiling", yakni kesenangan untuk memukul. Mungkin ini muncul sebagai hasil dari pelatihan Peta, Heijo, Keiboden, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, dengan munculnya generasi elite politik hasil pendidikan Jepang, maka hilang pulah "budaya demokrasi" yang semula ditanamkan para elite politik Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Belanda yang liberal itu.

Pendidikan nasional kita pada saat ini tidak mengajak murid-murid Indonesia untuk memahami dan menikmati budaya demokrasi dari hasil eksplorasi kehidupan mereka.

Budaya demokrasi yang harus mereka hayati adalah budaya demokrasi yang sudah terancang. Terancang ironisnya oleh generasi yang merupakan hasil pendidikan Jepang. Sementara lingkungan di dalam dan luar sekolah juga tidak dapat digunakan acuan murid-murid sekolah dan generasi muda guna mengembangkan budaya demokrasi dalam diri mereka. Yang mereka lihat justru orang-orang yang memiliki budaya demokrasi yang tinggi tidak memperoleh "kenikmatan materi" atau jabatan.

Berkembangnya budaya demokrasi dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada tersedianya alternatif bagi seseorang dalam sektorekonomi. Tersedianya alternatif akan membuat orang lebih berani memilih antara berbudaya demokrasi atau berbudaya otoriter. Sayang sekali swasta yang berkembang adalah kebanyakan sektor yang dimiliki oleh warga negara Indonesia keturunan yang takut berpolitik demi keselamatan bisnis mereka. Dengan kata lain, budaya demokrasi di Indonesia lemah karena rakyat masih bergantung kepada pemerintah dalam kehidupan ekonomi.